

## Koperasi Untuk Indonesia Abad Ke-21

Oleh: Sayuti Hasibuan

Dalam Buletin No.3 disampaikan bahwa fokus kebijakan ekonomi di sektor keuangan/perbankan adalah pada keuangan/perbankan syariah. Disarankan agar Pemerintah menempuh langkah-langkah agar dalam waktu lima belas tahun dari sekarang porsi aset perbankan syariah mencapai 50 % dari aset perbankan secara keseluruhan yang sekarang baru mencapai 1,7 % saja. Dapat ditanyakan, kalau disektor keuangan/perbankan, fokus kebijakan adalah pada sektor syariah apa yang menjadi fokus pada pembangunan sektor riil ? Jawaban terhadap pertanyaan ini ***tidak perlu diragukan lagi adalah pada pengembangan usaha koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi untuk Indonesia abad ke 21.***

### Kegagalan Koperasi

Mungkin Kenapa koperasi gagal berkembang sebagaimana yang diharapkan? Secara mendasar kegagalan ini adalah disebabkan koperasi yang berbasis kekuatan manusia, atas dasar persamaan dan kebersamaan, satu orang satu suara, dihadapkan kepada lingkungan yang didominasi oleh kekuatan materi dalam bentuk kapital, satu saham satu suara. Kekuatan kapital yang dihipunkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas telah berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan. Kekuatan pendorong dibelakang kapital itu adalah memajukan kepentingan diri sendiri yaitu kepentingan para pemilik modal. Keserakahan yang ada dalam diri manusia didorong dan dimanfaatkan dalam akumulasi kapital lebih lanjut, akumulasi mana akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan menghasilkan lapangan kerja dan pemerataan.

Harapan inilah yang tidak terpenuhi sebagaimana sudah disampaikan dalam Buletin No. 2. Memang pemerintahan-pemerintahan Indonesia di masa lalu telah berupaya mengendalikan kekuatan kapital dan faktor utama dibelakangnya, cinta-diri. Di zaman Bung Karno perusahaan-perusahaan besar yang waktu itu dimiliki asing diambil alih oleh pemerintah, dalam rangka mengembangkan sosialisme ala Indonesia. Walaupun pemilik modal sekarang adalah pemerintah, cinta-diri

yang ingin dikendalikan berpindah kepada pejabat-pejabat yang mengurus perusahaan-perusahaan ini. Inefisiensi dan korupsi berkembang. Di zaman Pak Harto, koperasi dikembangkan bahkan ada departemen pemerintah yang khusus mengurus koperasi. Tetapi perkembangan dunia usaha berbasis kapital, utamanya perseroan terbatas juga dibiarkan berkembang; secara efektif perusahaan-perusahaan berbasis kapital yaitu perseroan terbatas dibiarkan bersaing dengan perusahaan-perusahaan berbasis manusia seperti koperasi. Perseroan terbatas - perseroan terbatas tumbuh dan berkembang pesat membuat sebagian kecil pengusaha yang tergolong kedalam yang 0,1 % menjadi amat kaya. Atas nama kemajuan teknologi, banyak perusahaan rakyat kehilangan peran. Begitu kuat cinta-diri yang tersimpan dalam bentuk perusahaan berbasis kapital ini sehingga mereka seolah kehilangan perspektif sosial dan solidaritas sosial. Bahkan membuat sambal dan racikan rempah rempah untuk rendangpun, umpamanya, yang banyak dijual di pasar-pasar rakyat sekarang semakin banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan berbasis modal kuat. Kerusakan lingkungan sebagai dampak beroperasinya perusahaan-perusahaan berbasis kapital seperti rusaknya tanaman bakau di pantai-pantai, rusaknya lingkungan sosial di perkotaan dengan tergusurnya banyak perusahaan kecil oleh mal-mal sudah menjadi pandangan sehari-hari di banyak perkotaan di Indonesia. Semua ini ditempuh untuk dan atas nama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi.

Kesudahan dari persaingan ini mudah ditebak yaitu kekalahan perusahaan-perusahaan berbasis manusia seperti koperasi. Pertumbuhan ekonomi yang diraih masyarakat semakin bersumber dari kapital sebagaimana yang dialami selama masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Antara tahun 1972-1990, umpamanya, dari rata-rata per tahun pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 7,2 %, kapital menyumbang 5,1 % dan tenaga kerja menyumbang 2,1 %, Produktivitas masyarakat menyumbang 0,0 %. ( Sayuti Hasibuan, 1996, hal.175 ). Keadaan struktur perekonomian dengan produktivitas masyarakat rendah dan peran modal yang besar tidak

mungkin berubah dalam jangka pendek. Pada tahun 2003, umpamanya, menurut angka-angka yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2004-2009, umkm yang berjumlah 42,4 juta unit atau 99,9% dari jumlah seluruh unit usaha di Indonesia menghasilkan 56,7% dari seluruh Produk Domestik Bruto dan menyerap 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 % dari seluruh tenaga kerja. Unit usaha besar yang merupakan hanya 0,1 % dari seluruh unit usaha menghasilkan 43,3 % dari PDB dan 0,5 % dari seluruh lapangan kerja yang ada pada waktu itu. Kesenjangan yang tercipta dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dengan struktur perekonomian yang demikian tentulah amat besar. Kesenjangan investasi antar-sektor sebagaimana yang dikemukakan dalam Buletin No.2, Agustus 2007, dimana sektor pertanian yang mepekerjakan lebih dari 60 % dari angkatan kerja yang bekerja, hanya memperoleh 7,5 % dari seluruh investasi mencerminkan kesenjangan struktur sosial-ekonomi masyarakat. Dalam tahun 2003 yang lalu, PDB Indonesia berjumlah US\$ 234,8 miliar. Sejumlah 42,4 juta unit usaha UKMK atau 99,9 % menghasilkan US\$ 133 miliar. Sedangkan 0,1 % usaha besar atau 42400 unit menghasilkan selebihnya yaitu US\$101,8 miliar. Perbedaan gaya hidup yang besar tidak dapat dihindarkan.

**Seandainya** koperasi berhasil dikembangkan sehingga menjadi dominan perannya dalam perekonomian, produktivitas masyarakat diyakini akan menyumbang secara positif lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebab baik kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi akan berisikan input SDM berdaya saing tinggi. Kalau SDM koperasi tidak berdaya saing tinggi, apalagi dizaman globalisasi dan persaingan ketat saat ini, tidak mungkin koperasi menjadi dominan dalam perekonomian. Bagaimanapun, sebagai kelanjutan dari produktivitas masyarakat yang tinggi yang bersumber antara lain dari kelembagaan koperasi yang berdaya saing tinggi, adalah kemandirian masyarakat Indonesia yang tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata dan kesenjangan yang lebih kecil daripada yang dialami saat ini. Lebih dari itu korps kepemimpinan dibidang perekonomian sudah akan terbentuk dan kemajuan yang dicapai akan berkelanjutan. Indonesia akan lebih siap menghadapi persaingan global.

### **Pembangunan Indonesia Tidak Menjadikan Koperasi Sebagai Fokus.**

Apa yang disampaikan diatas dimaksudkan bukan untuk berandai-andai mengenai masa lalu; tetapi untuk memberi gambaran apa yang bisa diharapkan kalau para pemimpin Indonesia dibidang perekonomian sejak awal konsisten mengembangkan konsep-konsep dasar yang telah dihasilkan oleh bapak-bapak pendiri Republik ini.

Tetapi apakah benar tidak ada fokus kepada pembangunan perkoperasian saat ini ? Secara umum, tidak adanya fokus operasional dalam RPJMN 2004-2009 sudah dibahas dalam tulisan *Teorema Ketidakmungkinan dan Pelaksanaan RPJMN 2004-2009*. (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.IV, September 2005). Kalau diperhatikan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, koperasi dan menengah, sebagaimana yang termuat dalam RPJMN tersebut, jelas terlihat tidak adanya fokus. Yang mau dibangun adalah koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah. Jadi semuanya mau dibangun. Semuanya menjadi fokus alias tidak ada fokus. Ini terlihat dari sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana yang terlihat pada Bab 20 dari RPJMN: Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Koperasi tidaklah menjadi fokus. Bahkan kalau diperhatikan seluruh 36 bab yang ada pada RPJMN 2004-2009, tidaklah terlihat adanya fokus kepada pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemerintahan secara keseluruhan tidak memberi fokus bagi pengembangan usaha rakyat.

### **Harus Buat Pilihan**

Para pemimpin Indonesia saat ini perlu membuat pilihan tegas mengenai basis pokok operasional pembangunan bangsa kedepan. Sebagai manusia, sebagai wakil Tuhan di bumi, para pemimpin harus membuat pilihan dalam kepemimpinannya. Bagaimana mewujudkan pilihan, itu satu masalah lain tetapi secara prinsip pilihan harus dibuat. Alasan penting lain bahwa pilihan harus dibuat adalah sebagai alat untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi manajemen pembangunan bangsa dengan menetapkan fokus dalam manajemen ini. Bagaimanapun terdapat tiga pilihan 1. pembangunan berbasis pokok manusia dengan kelembagaan koperasi; 2. pembangunan berbasis pokok materi dengan kelembagaan utamanya perseroan terbatas; 3. pilihan tidak tegas mau yang mana. Yang ketiga ini sesungguhnya bukan pilihan sebab pengalaman menunjukkan membangun koperasi tetapi memberi keleluasaan kepada perusahaan berbasis materi untuk berkembang pada ujungnya memarjinalkan koperasi dengan semua konsekwensi sosial-politik-budaya pembangunan berbasis materi. Pilihan kedua tidak boleh dilakukan sebab ini dalam praktek dan teorinya menuhankan materi dengan konsekwensi negatif bagi terwujudnya cita-cita membangun bangsa sesuai dengan nilai-nilai pokok dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Ini bukan berarti materi, sebagaimana yang disimbolkan oleh kapital tidak penting; jauh dari itu. Kapital perlu dihimpun tetapi sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan sesuai cita-cita kebangsaan. Tinggal pilihan pada koperasi.

Tetapi apa maknanya memilih koperasi? Maknanya adalah ia dijadikan **fokus** pembangunan dunia usaha kedepan. Menjadikan koperasi sebagai fokus diperlukan karena bentuk usaha ini yang terlihat paling mampu memenuhi pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 khususnya ayat 4 yang bunyinya adalah: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Namun perlu dikemukakan bahwa fokus koperasi yang dipilih bukan pula sembarang koperasi. Ia mestilah koperasi yang berbasis kepada Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya kepada kemanusiaan itu sendiri sebagaimana terdapat dalam negara-negara sekuler. Ini berarti kemanusiaan yang menjadi basis koperasi perlu menganut dan melaksanakan nilai-nilai ekonomi syariah. Pelaksanaan nilai-nilai ekonomi syariah merupakan kebutuhan secara teknis mengingat kegagalan ekonomi konvensional baik secara teoritis maupun praktis dalam pembangunan Indonesia termasuk dalam membangun koperasi. Ekonomi syariah memiliki substansi mengenai berbagai paradigma dan pandangan dunia yang amat cocok diabad ke 21 dalam meningkatkan moralitas serta daya saing lembaga-lembaga ekonomi termasuk koperasi

Tetapi kenapa pilihan fokus itu perlu dilakukan sekarang ? Kekaburan mengenai aturan-aturan dan prinsip-prinsip pokok membangun perekonomian atas dasar nilai-nilai pokok Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup lama berlangsung dengan akibat negatif bagi kemajuan bangsa. Bilamana fokus pada koperasi dapat disepakati maka sumber konflik politik dimasa depan yang bersifat mendasar sudah dapat dihapuskan. Dalam kaitan ini diskusi nasional mengenai koperasi yang disponsori oleh ICMI bekerjasama dengan PB NU dan dilaksanakan di gedung Bappenas tanggal 27 Desember 2007 yang lalu, diharapkan akan berperan positif bagi penerimaan dan pelaksanaan koperasi sebagai fokus operasional pembangunan perekonomian bangsa. Yang perlu pemikiran sekarang adalah masalah manajemen perubahan dari perekonomian yang utamanya berbasis materi dengan sistem perbankan/keuangan yang ribawi ke sistem perekonomian berbasis manusia/koperasi dengan sistem keuangan/perbankan syariah. Secara umum persoalan manajemen perubahan ini sudah disampaikan dalam tulisan "**Memaksimalkan Kompetensi Untuk Keluar Dari Krisis Dan Membangun Bangsa Kedepan**" yang akan diterbitkan dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia, "**Transformasi**" dalam waktu dekat. Dibawah ini dikemukakan beberapa pemikiran mengenai manajemen perubahan ini.

## ***Bagaimana Mewujudkan Perubahan?***

Anggaphlah semua pemangku kepentingan sudah bersepakat menjadikan koperasi syariah sebagai fokus pembangunan dunia usaha Indonesia dalam jangka panjang? Langkah-langkah apa yang diperlukan ?

**Pertama**, adalah penjabaran secara kuantitatif makna menjadikan koperasi syariah sebagai fokus jangka panjang. Pada saat ini 99,9 % unit usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi (umkmk) menghasilkan sekitar 57 % dari seluruh Produk Domestik Bruto Indonesia. Yang 0,1 % menghasilkan sekitar 43 % dari PDB. Perbandingan struktural ini mau diubah bagaimana? Berapa porsi umkmk dalam PDB, katakanlah, 15 tahun dari sekarang ? Perlulah diakui bahwa proporsi ini tidak bisa diubah terlalu cepat karena kemampuan untuk mendukung umkmk yang berdaya saing secara berkelanjutan tidak bisa diwujudkan dengan cepat. Katakanlah, untuk kepentingan argumentasi, umkmk yang 99,9 % menghasilkan 65 % dari PDB dan yang 0,1 % menghasilkan 35 %. Kalau ini bisa dicapai tentu ini merupakan satu perbaikan berarti dalam mengurangi kesenjangan. Kalau telah ditetapkan besaran-besaran indikatif seperti ini yang menyangkut perubahan struktural distribusi pendapatan, maka tersedia ancang-ancang mengenai kebijakan jangka menengah dan pendek yang diperlukan dibidang perekonomian maupun bidang-bidang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya dasar untuk menciptakan berbagai langkah **antisipatif** dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebijakan yang bersifat **reaktif** dapat diminimumkan. Sifat perencanaan diubah dari yang hanya berisikan serentetan keinginan sebagaimana adanya RJPMM menjadi yang bersifat "road-map" untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan. Umpamanya, kebijakan Pemerintah mengenai komoditi kedelai yang menyangkut kepentingan dasar banyak pengusaha mikro dan pengusaha kecil, seyogianya bersifat antisipatif yang sudah dipikirkan dan tercantum dalam "road-map" dan tidak reaktif sebagaimana yang terkesan selama ini. Kebijakan reaktif juga dalam banyak situasi adalah kebijakan lamban dan ragu-ragu karena tidak jelas arah operasional yang dituju. Juga kebijakan kurang bersifat integratif. Unsur-unsur kepentingan pribadi penguasa mudah masuk menjadi parameter pengambilan keputusan.

**Kedua**, peningkatan peran koperasi dalam perekonomian umumnya dan dalam umkmk khususnya memerlukan "programing" yang terarah, termasuk konversi koperasi yang ada menjadi koperasi syariah. Pada tahun 2003 yang lalu, menurut sumber RPJMN 2004-2009, terdapat 123 ribu unit koperasi dengan 27,3

juta anggota. Tetapi yang aktif hanyalah 93,8 ribu unit atau 76 % dan diantara yang aktif hanya sekitar 48 % atau 44,7 ribu unit koperasi yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan ( RAT ). Bagaimana mensyariahkan koperasi yang sudah ada ? Apakah tepat memulai dari koperasi yang sudah ada ? Kalau definisi syariah adalah koperasi yang dikelola dengan penuh moralitas dan daya saing tinggi, maka kiranya amat tepat memulai mensyariahkan dari koperasi yang ada. Hal ini memerlukan standardisasi makna syariah yang menyangkut koperasi. Bagaimanapun masalah masalah "programming" memerlukan perhatian.

**Ketiga**, diperlukan satu badan di pemerintahan yang antara lain bertugas memikirkan dan merencanakan serta menyiapkan program-program pokok dalam mengupayakan berkurangnya kesenjangan di bidang sosial-ekonomi. Menjadikan koperasi syariah sebagai fokus pembangunan ekonomi bangsa akan memiliki implikasi realokasi sumber-sumber ekonomi-keuangan dan sdm yang luas. Umpamanya, dilaporkan oleh Arif Nur Alam, Sekretaris Jendral Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, bahwa sebanyak 60-70 % dari APBN 2007, atau Rp.457 triliun-Rp. 534 triliun dihabiskan untuk membiayai birokrasi pemerintah, legislatif, dan aparat hukum. Besarnya APBN 2007 adalah Rp.763 triliun. Sesungguhnya dana APBN yang begitu besar digunakan untuk membiayai birokrasi pada dirinya bukan masalah asalkan birokrasi efektif sebagai alat mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan pokok bangsa utamanya menjadikan koperasi syariah sebagai ciri utama kelembagaan perekonomian nasional. Inilah salah satu tugas badan sentral ini. Pada lain kesempatan saya sudah mengemukakan bahwa badan sentral ini adalah Bappenas yang sudah diadakan perubahan-perubahan seperlunya. Secara umum perlulah dikemukakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan satu "think-tank" operasional yang akan membantu bangsa mengintegrasikan berbagai unsur

gelombang perubahan besar yang melanda dunia saat ini dan di masa-masa yang akan datang.

### ***Kesimpulan***

Selama ini dalam perencanaan pembangunan Indonesia tidak pernah ditetapkan sasaran struktural berupa seberapa besar peran koperasi dan perusahaan mikro, kecil dan menengah harus meningkat secara relatif dalam menghasilkan produksi nasional atau PDB. Peran ukmk dicoba ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan langkah-langkah. Namun perusahaan-perusahaan berbasis modal kuat secara efektif dibiarkan bersaing dengan perusahaan-perusahaan berbasis manusia seperti koperasi. Koperasi khususnya dan usaha mikro, kecil dan menengah umumnya kalah bersaing dalam pasar yang dibiarkan bebas. Membiarkan persaingan ini merupakan kesalahan fatal ditinjau dari segi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dibidang ekonomi. Dampak dari kekalahan persaingan ini adalah sebagian kecil pengusaha amat kaya dan sebagian besar pengusaha tertinggal jauh. Kesenjangan yang ekstrim tercipta bukan saja dalam distribusi kekayaan tetapi juga dalam gaya hidup. Kesenjangan yang demikian berlawanan dengan cita-cita kemerdekaan dan mengurang daya hidup Indonesia sebagai negara kesatuan dalam jangka panjang. Proses konsentrasi kekayaan perlu distop secepat mungkin. Pilihan harus dibuat dan pilihan itu adalah pengembangan dunia usaha berbentuk koperasi syariah.

Untuk itu, perlu ditetapkan sasaran struktural mengurangi kesenjangan dalam perekonomian bangsa. Sasaran struktural ini adalah dalam bentuk meningkatnya peran relatif kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam pembentukan kekayaan di Indonesia. Dalam kaitan ini, maka pengembangan koperasi syariah perlu dijadikan inti dari strategi pembangunan dunia usaha Indonesia kedepan. Pencapaian sasaran struktural ini memerlukan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi, suatu "road-map", yang perlu dilaksanakan secara konsisten." Road-map" ini yang tidak ada selama ini. Dalam kaitan ini amat dibutuhkan keberadaan sebuah lembaga sentral yang akan merencanakan dan menyusun "road-map" bagi pembangunan bangsa kedepan.

## **BULETIN FAKULTAS EKONOMI terbit setiap bulan**

***Boleh dikutip  
dengan menyebutkan  
sumbernya.***